



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN**

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA



2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan analisis pengukuran kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diselesaikan. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja setiap tahun anggaran pada suatu organisasi/instansi. Pengukuran kinerja dapat menjadi pedoman dalam setiap program perencanaan yang dijalankan agar bisa mengukur dan melihat kembali semua program dan kegiatan dalam mencapai target sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Terimakasih yang dapat kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait atas partisipasi, dukungan, dan bantuannya dalam penyusunan laporan analisis pengukuran kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19700728 199803 1 006

BAB I

INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah Sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021. Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2022-2026

	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan 1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	85,50	85,50
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pertanahan)							
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Tujuan 2							
	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)							
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	65,89

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 1.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dan Penataan Ruang Kab. Kebumen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (%)
		Cap. 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
1.	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80	80	77,8	80	82,5	85	87,5	87,5
2.	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	17,54	18,75	20	21,25	22,5	23,75	25	25
3.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	15,98	15,98	15,98	17,04	18,01	19,98	20,04	20,04
4.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,13	80,13	81,14	81,14	82,15	83,16	83,84	83,84
5	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertangani	13,04	13,04	13,91	13,91	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
7	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	44,92	44,92	44,92	50,15	55,08	60	64,92	64,92

8	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	75,00	75,00	91,15	91,25	91,35	91,45	91,55	91,55
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

1.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan sasaran program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Kebumen Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 Indeks	90,91 Indeks				
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100
2	Tujuan :							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89 Indeks	66,89 Indeks				66,89
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67 Indeks	63,67 Indeks				63,67

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Kab.Kebumen, 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.118.828.122.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 45.086.805.000,00 dan Belanja Modal Rp.73.741.317.000,00. Selanjutnya setelah perubahan APBD 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 219.364.976.583,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 55.815.718.070,00 dan Belanja Modal Rp.163.549.258.513,00.

Tabel 1.4
Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.22.918.860.000,-	Rp.21.530.060.000,-
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.15.793.006.000,-	Rp.2.820.461.600,-
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 894.130.000,-	Rp.4.116.630.000,-
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.1.669.045.000,-	Rp.6.891.815.400,-
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.24.405.833.000,-	Rp.13.063.618.683,-
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp.758.764.000,-	Rp.1.663.263.900,-
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 51.466.169.000,-	Rp.168.498.861.000,-
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.101.114.000,-	Rp.93.044.000,-
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.791.201.000,-	Rp.666.392.000,-
10.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 30.000.000,-	Rp.20.830.000,-
	TOTAL	Rp.118.828.122.000,-	Rp.219.364.976.583,-

Sumber: DPA Murni dan Perubahan DPUPR Kab. Kebumen, 2025

BAB II

ANALISA KINERJA

2.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan program dan kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi: *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke-I (satu) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi dan Misi Ke-IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang kemudian tujuan ini dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan
- b. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan perjanjian kinerja tahun kelima periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja terdapat 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rea	Tingkat Capaian	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
1.	Tertanganinya kasus sengketa lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tujuan : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah						
1.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Indeks Kualitas Infrastruktur	66,89	Realisasi dicukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		

2.	mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Daerah				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67%	Sangat Tinggi

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen Tahun, 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap sasaran strategis pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Pada tujuan ke-1 yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik, sasaran tertanganinya kasus sengketa lahan, yang diukur melalui indikator Persentase Penanganan Sengketa Lahan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja 100 persen dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut juga didukung oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, menunjukkan kasus sengketa lahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi secara efektif dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan optimalnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pelayanan dan penanganan sengketa lahan yang dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Kebumen. Adapun jumlah pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pengaduan dan Penanganan Sengketa Pertanahan
Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Penguasaan dan pemilikan	6 Kasus
2	Pemeliharaan data pendaftaran tanah	7 Kasus
3	Tanah adat/tanah ulayat	4 Kasus
4	Letak dan batas bidang tanah	3 Kasus
Jumlah Total		20 Kasus
Persentase		100%

Sumber : BPN, Kab.Kebumen,2025

Selanjutnya, pada tujuan ke-2 yakni, meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, capaian indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dicukupi dari data yang bersumber dari DPUPR dan DISPERKIMHUB, sehingga pengukuran kinerja dilakukan secara komparatif lintas perangkat daerah. Sementara itu, sasaran ke-2 yakni, meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi dengan target 63,67 dengan realisasi sebesar 59,64 sehingga presentase capaian nya mencapai 93,67 persen mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur daerah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Melihat 2 sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara rata-rata adalah sangat tinggi, maka hal ini menunjukkan efektivitas dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan di dukung melalui 10 (sepuluh) program unggulan yang meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Kebumen Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	93,75	93,75	Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dihapus pada saat penganggaran
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	85	78,85	92,76	Pada TA 2025, DAK Bidang Irigasi tidak dialokasikan/tidak turun, sehingga kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi yang sebelumnya direncanakan melalui sumber dana tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	23,75	25,79	108,59	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	19,98	16,43	82,23	Adanya efisiensi anggaran sehingga realisasi tidak dapat dicukupi sesuai target. Untuk itu pekerjaan diprioritaskan dilokasi yang baru saja terjadi permasalahan/ kerusakan sesuai dengan urgensitas kebutuhan penanganan.

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	83,84	85,52	102,00	
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,	Persentase Pekerjaan Bangunan yg Tertangani	%	15	15	100	
7	Program Penyelenggaraan Jalan,	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	85,18	74,27	87,19	Penurunan kondisi jalan dari sedang menjadi rusak ringan atau rusak berat yang diakibatkan dari beberapa faktor seperti peningkatan volume lalu lintas, cuaca, drainase dan umur perkerasan sehingga target kemantapan jalan tidak naik signifikan
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi,	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah dibina dan Nilainya Baik	%	64,92	64,92	100	
9	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,45	91,45	100	
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	Persentase Penanganan sengketa Lahan	%	100	100	100	

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Berdasarkan tabel diatas, secara umum, capaian kinerja program termasuk kategori sangat tinggi, dengan sebagian besar program mencapai atau melampaui target. Dari 10 program, 6 program mencapai 100% atau lebih, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program pada Tahun Anggaran 2025. Program yang capaian kinerjanya mencapai dan melampaui target antara lain Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan

Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia, serta fokus pada kegiatan prioritas. Sementara itu, beberapa program menunjukkan capaian belum optimal, antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, serta Program Penyelenggaraan Jalan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan dan efisiensi anggaran, termasuk tidak dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi pada Tahun Anggaran 2025, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Selain itu, faktor teknis seperti peningkatan volume lalu lintas, kondisi cuaca, sistem drainase, serta umur perkerasan jalan turut mempengaruhi capaian indikator kinerja. Secara keseluruhan, capaian kinerja program telah mencerminkan upaya perangkat daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan akuntabel. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan prioritas pada kegiatan strategis, serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif guna mendukung peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

2.2. Perbandingan Kinerja

Capaian kinerja terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 s/d 2025 secara umum mencapai 100%. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terdapat 2 (dua) indikator berupa indeks kepuasan masyarakat, indeks kualitas Infrastruktur Daerah dan indeks infrastruktur pekerjaan umum. Untuk selanjutnya realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran dan realisasi kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 s/d 2025 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Kebumen Tahun 2022 s/d 2025

Tahun 2022				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81	56,07	104,39% Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35	57,89	100,9%

Tahun 2023				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	59,27	57,93	97,74% Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16	58,94	99,63%

Tahun 2024				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10	68.65	108,79% Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48	59,00	95,96%

Tahun 2025				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB	
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67%

Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Tabel 2.6
Capaian Kemajuan Sasaran Strategis DPUPR Dari Ta.2022 s/d 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100	100
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	56,07	57,93	68,65	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,89	58,94	59,00	59,64

Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Berdasarkan keterkaitan Tabel 2.5 Capaian Kinerja dan Tabel 2.6 Capaian Kemajuan Sasaran Strategis, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama Tahun 2022–2025 menunjukkan capaian

yang konsisten dan progresif. Penanganan sengketa lahan berhasil dipertahankan pada tingkat 100% setiap tahun, mencerminkan efektivitas penyelesaian permasalahan pertanahan. Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan signifikan, ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah hingga Tahun 2024, sementara realisasi Tahun 2025 masih dalam proses pengukuran kinerja karena dilakukan secara kompilatif lintas perangkat daerah. Selanjutnya, Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum menunjukkan tren peningkatan bertahap dari Tahun 2022 hingga 2025, yang menegaskan adanya perbaikan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan keberhasilan DPUPR Kabupaten Kebumen dalam mendorong kemajuan sasaran strategis, dengan tetap memerlukan penguatan pada aspek kualitas hasil pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ke depan.

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025 dengan Target Akhir 2026

Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,64	65,89	90,51%

Sumber : DPUPR Kab Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 2.7 diatas, tahun 2025 merupakan tahun ke-5 implementasi rencana strategis, adapun indikator capaian kinerja yang pertama adalah presentase penanganan sengketa lahan pada tahun 2025 sebesar 100 persen, sesuai dengan target akhir periode rencana strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan sengketa lahan telah berjalan efektif dan mampu

memenuhi target yang direncanakan. Selanjutnya pada indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum menunjukkan capaian sebesar 59,64 dari target akhir 65,89, dengan tingkat capaian mencapai 90,51 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja berada pada kategori tinggi, namun masih terdapat selisih capaian yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien agar target akhir tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

2.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 219.364.976.583 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 212.068.150.477 (96,67%). Realisasi total anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tertuang dalam tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.8
Realisasi Keuangan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen

Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			
	Pagu	Realisasi	Cap (%)	Deviasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.530.060.000	20.345.988.036	94,50%	5,50%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.467.000	148.186.582	95,32%	4,68%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.745.000	61.327.676	93,28%	6,72%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.722.000	86.858.906	96,81%	3,19%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.660.306.000	18.593.853.183	94,58%	5,42%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.248.216.000	18.200.122.956	94,55%	5,45%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	412.090.000	393.730.227	95,54%	4,46%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.039.000	86.688.204	84,96%	15,04%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.039.000	86.688.204	84,96%	15,04%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.646.000	265.339.441	98,04%	1,96%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.315.000	37.064.300	99,33%	0,67%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.780.000	66.750.200	99,96%	0,04%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.674.000	20.492.440	99,12%	0,88%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.996.000	99,96%	0,04%
Penyediaan Bahan/Material	56.400.000	56.354.700	99,92%	0,08%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.414.000	61.699.701	92,90%	7,10%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.063.000	12.982.100	99,38%	0,62%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.114.000	203.398.350	96,35%	3,65%
Pengadaan Mebel	40.000.000	39.127.900	97,82%	2,18%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.114.000	164.270.450	96,00%	4,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.558.000	392.618.385	83,08%	16,92%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.812.000	90,60%	9,40%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	220.467.185	73,49%	26,51%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.558.000	170.339.200	99,87%	0,13%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.930.000	655.903.891	99,69%	0,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.892.000	443.720.891	99,96%	0,04%
Pemeliharaan Mebel	20.000.000	19.929.000	99,65%	0,36%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.544.000	59.265.000	99,53%	0,47%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.494.000	132.989.000	98,88%	1,12%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.820.461.600	2.781.922.586	98,63%	1,37%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.396.100	227.045.650	98,98%	1,02%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	84.986.250	84.399.150	99,31%	0,69%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	144.409.850	142.646.500	98,78%	1,22%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.591.065.500	2.554.876.936	98,60%	1,40%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	665.253.500	639.407.364	96,11%	3,89%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	879.755.000	878.919.972	99,91%	0,09%
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	482.902.000	481.271.700	99,66%	0,34%

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	563.155.000	555.277.900	98,60%	1,40%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.891.815.400	6.594.979.050	95,69%	4,31%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.891.815.400	6.594.979.050	95,69%	4,31%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase lingkungan	6.614.999.400	6.323.615.650	95,60%	4,40%
Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan Tekhnis Sistem Draenase Lingkungan	276.816.000	271.363.400	98,03%	1,97%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.116.630.000	3.961.797.167	96,24%	3,76%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.116.630.000	3.961.797.167	96,24%	3,76%
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	3.985.653.000	3.837.375.567	96,28%	3,72%
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000	96.126.000	96,13%	3,87%
Pembinaan dan pemeberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air minum (SPAM)	30.977.000	28.295.600	91,34%	8,66%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.063.618.683	12.740.634.316	97,53%	2,47%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.063.618.683	12.740.634.316	97,53%	2,47%

Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	119.474.600	105.892.500	88,63%	11,37%
Pembangunan, pemanfaatan , pelestarian dan pembongkoran, Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.352.553.000	12.088.611.532	97,86%	2,14%
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	101.857.300	64.441.220	63,27%	36,73%
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan Gedung	37.475.683	36.361.198	97,03%	2,97%
Pemeliharaan, Perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis Bangunan Daerah Kabupaten/Kota	452.258.100	445.327.866	98,47%	1,53%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.663.263.900	1.388.295.322	83,47%	16,53%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.663.263.900	1.388.295.322	83,47%	16,53%
Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.202.362.900	939.302.000	78,12%	21,88%
Penyusunan Rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah kabupaten/kota	460.901.000	448.993.322	97,42%	2,58%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	93.044.000	91.298.778	98,12%	1,88%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	43.830.000	43.312.300	98,82%	1,18%
Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	17.010.000	16.671.300	98,01%	1,99%

Pelatihan Tenaga kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis	26.820.000	26.641.000	99,33%	0,67%
Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	49.214.000	47.986.478	97,51%	2,49%
Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten / kota	49.214.000	47.986.478	97,51%	2,49%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.498.861.000	163.553.905.824	97,07%	2,93%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	168.498.861.000	163.553.905.824	97,07%	2,93%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.539.053.000	1.515.734.100	98,48%	1,52%
Pembangunan Jalan	785.039.000	85.682.200	10,91%	89,09%
Pemeliharaan Berkala Jalan	113.341.609.000	110.365.345.146	97,37%	2,63%
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	622.001.000	616.527.130	99,12%	0,88%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	28.000.000.000	27.376.079.712	97,77%	2,23%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.878.000	196.746.000	98,43%	1,57%
Pembangunan Jembatan	2.210.650.000	2.155.330.500	97,50%	2,50%
Pemeliharaan Berkala Jembatan	2.750.000.000	2.690.571.500	97,84%	2,16%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	549.497.000	525.225.000	95,58%	4,42%
Pemeliharaan Rutin Jalan	18.301.134.000	17.829.404.536	97,42%	2,58%
Pelebaran jembatan	200.000.000	197.260.000	98,63%	1,37%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	666.392.000	588.647.198	88,33%	11,67%

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	199.239.000	198.140.815	99,45%	0,55%
Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/kota	199.239.000	198.140.815	99,45%	0,55%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	369.992.000	293.712.566	79,38%	20,62%
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	350.042.000	273.904.766	78,25%	21,75%
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	19.950.000	19.807.800	99,29%	0,71%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77.839.000	77.684.925	99,80%	0,20%
Pelaksanaan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	41.153.000	41.079.228	99,82%	0,18%
Sistem Informasi Penataan Ruang	36.686.000	36.605.697	99,78%	0,22%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	19.322.000	19.108.892	98,90%	1,10%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	19.322.000	19.108.892	98,90%	1,10%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.830.000	20.682.200	99,29%	0,71%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000	20.682.200	99,29%	0,71%
Mediasi Penyelesaian Kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000	20.682.200	99,29%	0,71%
TOTAL	219.364.976.583	212.068.150.477	96,67%	3,33%

Sumber : Laporan Simpel DPUPR Kab. Kebumen,2025

Berdasarkan tabel diatas, dari 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2025, capaian keuangannya adalah 96,67%. Adapun untuk mengetahui tingkat

efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E :Efisiensi
PAKi :Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi :Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi :Capaian Keluaran i

Tabel 2.9
Tabel Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pembilang (efisiensi) (5*4%)-6	Penyebut (efisiensi) (5*4%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100	100	100%	20.830.000	20.682.200	99,29%	147.800	20.830.000
Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67%	175.435.952.600	170.297.625.577	97,07%	-5.965.911.849	164.331.713.728
				175.456.782.600	170.318.307.777	Jumlah	-5.965.764.049	164.352.543.728
						Efisiensi	-3,63%	

Sumber :DPUPR Kab.Kebumen,2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berada pada angka -3,63 persen, dari pagu anggaran neto rentang nilai antara (-20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa, secara keseluruhan berdasarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tercapai sebesar 59,64 persen meliputi Indikator Presentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 85,00 persen dapat terealisasi sebesar 78,85 persen dengan nilai capaian 92,76 persen. Kemudian Indikator Persentase Pelayanan Air Bersih dengan target sebesar 23,75 persen dapat terealisasi sebesar 25,79 persen atau dengan nilai capaian 108,59 persen sedangkan indikator Presentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi mantap dengan target 85,18 persen, dapat terealisasi sebesar 74,27 persen dengan nilai capaian 87,19 persen.
- 2) Secara Umum Capaian kinerja program DPUPR Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 dikategorikan baik adapun rata-rata tercapai sebesar 96,65 persen, dimana terdapat beberapa program di DPUPR yang capaiannya kurang dari 100 persen yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Penyelenggaraan Jalan.
- 3) Realisasi capaian keuangan secara keseluruhan sebesar 96,67 persen. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2025 telah disediakan dana sebesar Rp. 219.364.976.583 dan realisasi sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp. 212.068.150.477.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Perlu Dukungan Anggaran Pendamping baik dari Pusat, Banprov serta APBD, Kabupaten dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur drainase dan irigasi sehingga kegiatan-

kegiatan yang kinerjanya belum dapat mencapai target dapat selesai sesuai yang sudah direncanakan/dijadwalkan

- 2) Penetapan target kinerja disesuaikan dengan mempertimbangkan anggaran kas yang ada, termasuk besarnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.
- 3) Perlu dilakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada ruas jalan prioritas. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan teknis, optimalisasi sistem drainase jalan, serta penggunaan material sesuai standar guna meningkatkan kemantapan jalan dan memperpanjang umur layanan perkerasan.
- 4) Perlu dilakukan optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan guna memperluas cakupan pelayanan air minum, khususnya pada wilayah yang belum terlayani. Selain itu, dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan untuk meningkatkan kapasitas, kontinuitas, dan kualitas layanan air minum seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan sarana secara berkelanjutan, agar pelayanan air minum kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
- 5) Perlu dilakukan peningkatan fungsi dan kapasitas bangunan drainase melalui rehabilitasi, normalisasi saluran, serta penataan sistem drainase secara terpadu guna mengurangi genangan air dan meningkatkan efektivitas pengendalian limpasan air hujan.
- 6) Perlu dilakukan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjangkau wilayah pertanian yang belum terlayani, khususnya di daerah rawan kekeringan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan efisiensi distribusi air irigasi melalui perbaikan bangunan irigasi dan penguatan peran kelembagaan petani pemakai air agar ketersediaan air irigasi dapat terjaga terutama pada musim kemarau.

Demikian Laporan Analisis Atas Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak, atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19700728 199803 1 006